

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Tujuan koperasi Indonesia dalam Undang-Undang No.25 tahun 1992 pasal 3, adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Adanya koperasi diharapkan dapat menompang perekonomian Indonesia baik saat perekonomian menurun dan perekonomian stabil. Hal ini terkandung dalam tujuan dasar ekonomi Indonesia. Tujuan dasar ekonomi Indonesia terdapat pada pasal 33 ayat 1 yang menyatakan bahwa "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan". Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa usaha yang sesuai dengan pasal tersebut adalah koperasi. Koperasi sebagai suatu system yang ikut serta dalam kehidupan perekonomian Indonesia telah memiliki legitimasi tersendiri yang tertuang dalam Undang-Undang No.25 tahun 1992.

Keberadaan koperasi memudahkan masyarakat untuk mendapatkan modal, barang-barang, maupun saran investasi dimana keuntungan koperasi itu sendiri akan dikembalikan kepada anggota melalui sistem hasil usaha (SHU). Mudahnaya mendapat modal dan barang-barang akan berdampak langsung terhadap meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan usaha koperasi yang terus meningkat, pengelolaan professional koperasi sangat dibutuhkan terutama hal pengelolaan keuangan. Dari berbagai kasus yang muncul dalam bidang pengelolaan keuangan koperasi yang tidak transparan yaitu oknum ketua koperasi yang merupakan pengurus koperasi melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melakukan penggelapan dana anggota, belum lagi ditambah dengan penggelapan dana anggota peminjam yang dilakukan oleh oknum petugas koperasi itu sendiri. Hal tersebut dapat mencoreng citra dan nama baik koperasi dimata masyarakat. Selain itu kurangnya kemampuan pelaku koperasi dalam bidang pengelolaan usaha juga termasuk kendala yang dihadapi koperasi antara lain, rendahnya pendidikan dan kurangnya pengalaman pelaku tersebut dalam bidang akuntansi. Oleh karena itu, agar koperasi bisa berkembang dan menjadi seperti yang diharapkan, koperasi harus berpedoman pada suatu standar yang dibuat untuk mengatur pengelolaan koperasi itu sendiri.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terbukti telah mendorong dan merangsang pertumbuhan ekonomi nasional secara berkesinambungan. Kontribusi besar UMKM meliputi penciptaan lapangan pekerjaan, penyerapan tenaga kerja, dan terutama menjadi penompang saat terjadinya krisis ekonomi. Melihat peran penting tersebut, maka dibutuhkan dukungan dari seluruh pihak untuk mengembangkan dan mewujudkan UMKM yang maju, mandiri, dan modern termasuk memiliki akses pendanaan yang semakin luas ke sektor perbankan.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai organisasi profesi yang menaungi seluruh akuntan di Indonesia, senantiasa memenuhi komitmennya untuk turut memajukan perekonomian Negara. Sebagai bagian organisasi IAI yang mempunyai otonomi untuk menyusun dan mengesahkan standar akuntansi keuangan, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI telah mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) pada tanggal 24 Oktober 2016 dan akan berlaku efektif pada tanggal 01 Januari 2018 dengan penerapan dini diperkenankan. (IAI:2016)

Tahun 2009, DSAK IAI telah menerbitkan SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang juga diintensikan untuk digunakan oleh entitas kecil dan menengah. Namun, seiring perkembangannya, terdapat kebutuhan mengenai ketersediaan standar akuntansi yang lebih sederhana karena keterbatasan sumberdaya manusia. SAK EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang lebih sederhana dibandingkan SAK ETAP karena mengatur transaksi yang umum dilakukan EMKM dan dasar pengukurannya murni menggunakan biaya historis. (IAI:2016)

SAK EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang berdiri sendiri yang dapat digunakan oleh entitas yang memenuhi definisi entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan sebagaimana didefinisikan dalam SAK ETAP, definisi dan karakteristik dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). SAK EMKM ditujukan untuk digunakan oleh entitas yang tidak atau belum mampu memenuhi persyaratan akuntansi yang diatur dalam SAK ETAP. Penerbitan SAK EMKM diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong literasi keuangan bagi UMKM di Indonesia sehingga memperoleh akses yang semakin luas untuk pembiayaan dari industri perbankan. Kedepannya, SAK EMKM ini juga diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan dan pengembangan pedoman atau panduan akuntansi bagi UMKM yang bergerak di berbagai bidang usaha. (IAI:2016)

Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (EMKM) adalah entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, sebagaimana didefinisikan dalam SAK ETAP, yang juga memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setidaknya selama 2 tahun berturut-turut.

Jenis usaha yang tergolong dalam entitas mikro, kecil, dan menengah banyak terdapat di Indonesia termasuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Koperasi Simpan Pinjam merupakan lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usahanya menghimpun dan menyalurkan dana dari anggota dan untuk anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, yang perlu dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan koperasi simpan pinjam, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat disekitarnya.

Bagi perekonomian Indonesia, koperasi merupakan bentuk gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan dan sebagai salah satu penopang perekonomian negara dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Koperasi juga berperan sebagai salah satu fasilitator dan juga pendamping bagi masyarakat dalam melaksanakan usah-usahanya, misal melalui bantuan modal, manajemen, pemasaran, dan bantuan lainnya.

Sebagai badan usaha yang mengelola anggotanya, Koperasi Simpan Pinjam memiliki tanggung jawab kepada publik dan dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas yang merupakan salah satu sumber informasi yang penting dalam pengambilan keputusan serta suatu bentuk pertanggungjawaban atas aktivitas yang telah dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Informasi tersebut salah satunya tercermin dalam laporan keuangan. Laporan keuangan yang berkualitas dapat memberikan informasi yang akurat dan komperhensif bagi seluruh pihak yang berkepentingan dan menggambarkan kinerja koperasi simpan pinjam laporan keuangan secara utuh.

Tujuan laporan keuangan menurut SAK EMKM bab 2 paragraf 1 adalah untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Pengguna tersebut meliputi penyediaan sumber daya bagi entitas seperti kreditor investor. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Keterbatasan informasi akuntansi dan kelemahan pada pelaporan keuangan yang tidak terstruktur dengan baik dan tidak berstandar berakibat pada sulitnya koperasi-koperasi di Indonesia memperoleh bantuan dana atau permodalan dari pemerintah, mitra kerja ataupun perbankan. Kondisi tersebut tentunya akan mempersulit koperasi untuk meningkatkan kapasitas usahanya. Alasan utama sulitnya pemerintah memberikan bantuan kepada koperasi adalah karena sulitnya mencari data formal seperti laporan keuangan dan rencana bisnis yang belum jelas. Oleh sebab itu, para pelaku koperasi secara tidak langsung dituntut untuk melakukan pelaporan keuangan yang formal dan terstruktur sesuai dengan ketentuan standar yang berlaku agar dapat dipahami tidak hanya oleh pemilik tetapi juga oleh pihak lain, seperti pemerintah ataupun perbankan yang akan memberikan permodalan.

Penelitian ini difokuskan pada koperasi khususnya koperasi simpan pinjam, karena koperasi memiliki peran strategis dalam tata ekonomi dan penggerak perekonomian. Koperasi Simpan Pinjam sangat membantu nadi ekonomi masyarakat, khususnya usaha-usaha kecil atau tradisional yang membutuhkan pinjaman modal dengan syarat yang tidak sulit dan bunga yang tidak terlalu besar.

Adapun obyek penelitian ini adalah Koperasi Karya Bhakti Silo yang beralamat di Jalan Ahmad Yani no.90 Sumberjati, Silo, Jember. Sebagai koperasi simpan pinjam, kegiatan koperasi simpan pinjam Karya Bhakti Silo bergerak di bidang pinjaman dan simpanan.

Studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti dengan wawancara kepada bagian keuangan Koperasi Karya Bhakti Silo diketahui bahwa laporan keuangan yang dihasilkan Koperasi Karya Bhakti Silo berupa laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas. Sedangkan menurut IAI dalam SAK EMKM (2016: 8) paragraf 3.9, laporan keuangan entitas minimum terdiri dari laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan yang berisi tambahan dan rincian akun-akun tertentu yang relevan.

Koperasi Karya Bhakti Silo tergolong dalam entitas mikro, kecil, dan menengah sehingga agar penyajian laporan keuangannya berkualitas perlu mengacu pada SAK EMKM. Oleh karena itu diperlukan evaluasi atas hasil dan proses kegiatan akuntansi yang telah ditetapkan oleh Koperasi Karya Bhakti Silo agar menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM.

Penjelasan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penyajian dan Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM pada Koperasi Karya Bhakti Silo”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dasar yang ditemui dalam penelitian ini yaitu :

- 1.) Bagaimana Proses Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan pada Koperasi Karya Bhakti Silo?
- 2.) Bagaimana Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Koperasi Karya Bhakti Silo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditemukan, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.) Untuk menganalisis proses penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan pada Koperasi Karya Bhakti Silo
- 2.) Untuk menganalisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) pada Koperasi Karya Bhakti Silo.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang akan dilakukan, peneliti mengarahkan penelitian ini mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat digunakan sebagai wawasan penerapan teori dan pelajaran, serta menambah pengalaman mengenai bagaimana sesungguhnya aplikasi yang diperoleh dan diterapkan dalam kehidupan yang sesungguhnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

- 1.) Bagi peneliti, untuk menambah wawasan peneliti dalam bidang akuntansi yaitu tentang pencatatan akuntansi untuk koperasi pada Koperasi Karya Bhakti silo, serta pengembangan ilmu pengetahuan yang diperoleh dibangku kuliah.
- 2.) Bagi Koperasi Karya Bhakti Silo, sebagai bahan masukan bagi koperasi tentang penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM sebagai informasi yang penting untuk bahan bagi manajemen dalam pengambilan keputusan ekonomi.
- 3.) Bagi peneliti lain, sebagai tambahan referensi bagi pihak lain yang bermaksud ingin melakukan penelitian yang sama dimasa yang akan datang.